

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan menganalisis pemahaman aparatur terhadap SIPD dalam penyusunan laporan keuangan, implementasi SIPD dalam penyusunan laporan keuangan, dan dampak implementasi SIPD pada kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemahaman aparatur terhadap SIPD dalam penyusunan laporan keuangan menunjukkan bahwa pemahaman aparatur di BPKAD Kota Blitar sudah tergolong baik. Hal ini terlihat dari pemahaman aparatur terhadap fungsi SIPD, kemampuan dalam mengoperasikan fitur SIPD, dan pemahaman aparatur pada alur kerja yang terintegrasi mulai dari perencanaan hingga pelaporan akuntansi. Pemahaman tersebut bukan hanya berasal dari kemampuan teknis saja, melainkan dari proses pembelajaran, pengalaman kerja, dan keterlibatan aktif aparatur dalam pelaksanaan sistem.
2. Implementasi SIPD dalam penyusunan laporan keuangan menunjukkan bahwa pelaksanaannya di BPKAD Kota Blitar telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya komunikasi yang jelas seperti sosialisasi, BIMTEK, dan pendampingan secara berkala. Kemudian dari segi sumber daya dan sarana prasarana sudah memadai, disposisi aparatur yang kooperatif, dan struktur birokrasi yang terorganisir. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan memperkuat sehingga

keberhasilan implementasi tidak hanya tentang teknologi, tetapi juga hasil dari proses organisasi dan pembelajaran keberlanjutan. Namun demikian, masih diperlukan penyempurnaan praktik pelaksanaannya dan infrastruktur untuk mengatasi tantangan teknis yang timbul seperti gangguan jaringan atau server dan keterbatasan fitur.

3. Dampak implementasi SIPD pada kualitas laporan keuangan menunjukkan bahwa SIPD sudah memberikan perubahan positif pada laporan keuangan. Perubahan ini tercermin dari meningkatnya relevansi melalui kesediaan informasi yang sesuai kebutuhan, keandalan informasi yang dihasilkan, memperbaiki pemahaman dengan penyajian yang lebih terstruktur, dan mendukung keterbandingan melalui standarisasi format dan struktur data.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait maupun penelitian selanjutnya.

5.2.1 Saran Praktis

Berdasarkan hasil penelitian, BPKAD Kota Blitar diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas implementasi SIPD melalui penguatan kompetensi aparatur dengan pelatihan dan pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan, khususnya terkait penggunaan fitur-fitur terbaru dalam SIPD. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi antara BPKAD, OPD, dan pemerintah pusat agar kendala teknis maupun

perubahan sistem dapat ditangani lebih cepat dan efektif. Pemerintah pusat melalui Kemendagri juga diharapkan terus melakukan penyempurnaan fitur SIPD agar dapat memenuhi seluruh kebutuhan pelaporan keuangan daerah serta meningkatkan respons helpdesk dalam menangani permasalahan yang dialami pemerintah daerah. Di samping itu, dukungan sarana dan prasarana seperti stabilitas jaringan internet dan server juga perlu diperhatikan agar proses pengelolaan keuangan daerah melalui SIPD dapat berjalan lebih optimal.

5.2.2 Saran Akademik

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kajian mengenai implementasi sistem informasi pemerintahan daerah dan kualitas laporan keuangan sektor publik. Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian pada pemerintah daerah lain sehingga dapat memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai implementasi SIPD di berbagai daerah. Selain itu, penelitian berikutnya dapat menggunakan pendekatan penelitian yang berbeda, seperti pendekatan kuantitatif atau mixed methods, untuk mengukur pengaruh implementasi SIPD terhadap kualitas laporan keuangan secara lebih mendalam. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji aspek lain yang belum dibahas secara mendalam dalam penelitian ini, seperti efektivitas sistem, keamanan data, kesiapan teknologi, maupun evaluasi kebijakan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah.